

Pelatihan legal drafting

by Author 1 1

Submission date: 06-Feb-2023 11:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2007267077

File name: engabdian_kepada_Masyarakat_RJKM_Pelatihan_legal_drafting.docx (527.7K)

Word count: 3324

Character count: 22790

PENDAMPINGAN KOMPETENSI LEGAL DRAFTING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLATIF DESA

Risma Hikmawati¹, M. Bachrul
Ulum², Agus Setiawan³, Alyf Budi
Prihatama⁴, Berliana Asyifa Putri
Setiawan⁵, Ardi Mulya Prabowo⁶

¹)Prodi Perbandingan Madzhab,
Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

²)³)⁴)⁵)⁶) Prodi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

10 Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Email :

rismahikmawati017@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Dalam struktur pemerintahan dibawah kabupaten atau kota, Pemerintah Desa merupakan aktor penting dalam pengaturan dan penyelenggaraan kebijakan di tingkat bawah. Tetapi ketercapaian pengelolaan desa yang ideal sulit terwujud disebabkan perangkat desa juga khususnya di Kabupaten Banyumas belum memiliki kapasitas yang sesuai. Pengetahuan Legal Drafting merupakan salah satu kompetensi dalam lingkup kompetensi teknis bagi lembaga di desa untuk memenuhi fungsi legislatif desa. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam kompetensi legal drafting untuk melaksanakan otonomi desa dan kebutuhan pelaksanaan rumah tangga desa. Lingkup kegiatan pengabdian ini meliputi pelatihan dan pendampingan kompetensi legal drafting melalui metode partisipatif yang dilaksanakan selama 3 kali pertemuan di bulan September-Desember 2022, dengan sasaran aparatur desa di Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas dan Desa Bojongsari Kec. Kemiri Sran Kab. Banyumas. Pengabdian dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hasil dari pengabdian ini adalah terlaksananya berbagai pendampingan terkait pelatihan dan pendampingan kompetensi legal drafting, mencakup:

- a) Pelaksanaan kegiatan FGD pelatihan legal drafting,
- b) Pelaksanaan pendampingan legal drafting Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, dan

Pendampingan naskah legal drafting dalam kebutuhan desa.

Kata Kunci: Pelatihan; Kompetensi Legal Drafting; Aparatur Desa.

Abstract

In the government structure below the district or city. However, it is difficult to achieve ideal village management because village officials, do not have the appropriate capacity. Knowledge of Legal Drafting is one of the competencies within the scope of technical competency for village institutions to fulfill village legislative functions. The purpose of this service is to increase the understanding, knowledge, and skills of village officials in legal drafting competencies to carry out village autonomy and the implementation needs of village households. The scope of this community service activity includes training and mentoring for legal drafting competencies through participatory methods which are held for three times meetings in September-December 2022, targeting village apparatus in Banyumas. The service was carried out by lecturers and students of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. The result of this dedication is the implementation of various assistance related to legal drafting competency training and assistance, including:

- a) Implementation of legal drafting training FGD activities,
- b) Implementation of legal drafting assistance for Bojongsari Village, Kembaran District and Kedungwringin Village, Patikraja District, and
- c) Assistance for drafting legal texts in accordance with village needs.

Keywords: Training; Legal Drafting Competence; Village Officials.

Copyright © 2023 Risma Hikmawati, et al. All rights reserved

PENDAHULUAN

Dalam struktur pemerintahan dibawah kabupaten atau kota, Pemerintah Desa merupakan aktor penting dalam pengaturan dan penyelenggaraan kebijakan di tingkat bawah. Pemerintah Desa menjadi eksekutor utama penyelenggaraan kebijakan di tingkat desa diantaranya dengan tersedianya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalamnya.

Keputusan yang dihasilkan dari kelembagaan desa meliputi keputusan-keputusan yang bersifat sosial, dan keputusan-keputusan formal yang diproduksi untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.

Problem sosial yang terjadi lebih tepat jika ditangani oleh hukum, sebagaimana komitmen negara hukum, bahwa kegiatan kenegaraan sebaiknya didasarkan pada hukum tetapi juga tetap berfresfektif lokal, mempertimbangkan dimensi dimana hukum tersebut dan dalam situasi serta kondisi seperti apa diberlakukan. Keputusan formal di tingkat desa bisa melalui Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES), produk keluarnya bisa berbentuk Peraturan Desa (PerDes). Aspirasi dari warga desa dapat dicapai secara maksimal jika dituangkan dan dijalankan melalui perumusan produk hukum di desa (PerDes). Dalam hal ini, BPD menjadi institusi perantara yang menghubungkan antara kebutuhan Masyarakat desa kepada Kepala Desa. (Sutrisno, E., dkk: 2020).

Kabupaten Banyumas memiliki 301 desa dan 27 kecamatan (Data Statistik, 2019), angka tersebut menjadi jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yang mana otomatis memiliki wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat terbanyak.

Tugas desa melalui Badan Pemusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi sebaiknya dilaksanakan melalui tahapan penggalian aspirasi, menampung aspirasi, mengelola aspirasi, kemudian menyalurkan aspirasi tersebut yang telah diproses dalam bentuk lisan atau tulisan.

Sayangnya, kegiatan penyaluran aspirasi oleh Desa di Kabupaten Banyumas belum maksimal. Seperti halnya ditemukan problem belum ditemukannya data tertulis yang menampung aspirasi dari masyarakat, dan belum tercovernya pengelolaan aspirasi dari masyarakat desa. (Yuni Rahmawati: 2022)

Ukik Sheli ⁴ Arsani, dalam penelitiannya memotret masih diperlukannya peningkatan kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Banyumas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan administratif, kemudian kapasitas upaya menciptakan ruang partisipatif serta kapasitas dalam merespon, mengelola permasalahan dan kritik dari masyarakat. (Ukik Sheli Arsani, dkk: 2017)

Penelitian lainnya menyatakan bahwa dibutuhkan peningkatan SDM perangkat desa, karena data dilapangan menunjukkan telah banyak upaya-upaya yang telah dilaksanakan pemerintah desa di Kabupaten Banyumas, akan tetapi ketercapaian pengelolaan desa yang ideal sulit terwujud disebabkan, umumnya Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas belum memiliki kapasitas dalam pengelolaan desa terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, serta proses pengelolaan kebijakan publik baik dengan output hukum formal maupun informal, yang diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kebijakan pemerintah agar dapat melaksanakan semua program pembangunan yang secara teknis sudah diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Kadar Pamuji: 2018)

Salah satu penyebab minimnya kapasitas Pemerintah Desa ⁴ dalam dalam tata kelola pemerintahan dapat dibagi menjadi dua sebab. Pertama kemampuan perangkat desa belum memadai da belum dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang relevan, hal ini juga merupakan dampak turunan dari mekanisme perekrutan perangkat desa yang belum jelas pengaturannya dan standarnya, sehingga pengelola desa dapat terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan, dan berbagai kalangan. Kedua kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyediaan dan pengawasan pelatihan bagi perangkat desa. (Devit Bagus Indranika, dkk: 2020)

Kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan desa diantaranya adalah kompetensi manajerial (kompetensi manajemen untuk mencapai kinerja yang lebih efektif), kompetensi sosio kultural (kemampuan yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat melingkupi etika, moral, nilai budaya dan agama), dan kompetensi teknis (kompetensi yang berfokus pada pengelola yang memiliki keahlian di tempat dan bidang yang tepat).

Pengetahuan Legal Drafting merupakan salah satu kompetensi dalam lingkup kompetensi teknis bagi lembaga di desa untuk memenuhi fungsi legislatif desa. (Khairu Roojiqien: 2010). Kebutuhan produk legal bagi desa sangat diperlukan yang pada saat

ini desa telah memiliki otonomi dalam merancang peraturan desa, membahas dan menetapkan serta melakukan sosialisasi PerDes kepada masyarakat. (M Nurul Misbahuddin: 2010)

Hal ini juga didasarkan pada kebutuhan tersedianya peraturan desa sebagai respon dan amanat untuk mengakomodir kebijakan dari pusat, atau respon terhadap berbagai persoalan dalam lingkup desa yang membutuhkan diterbitkannya peraturan desa.

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan pengabdian pendampingan kompetensi Legal Drafting bagi Aparatur Desa, telah dilakukan analisis literatur, bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki tema serupa, akan tetapi diantaranya memiliki fokus yang berbeda, bahkan menjadi penyebab diperlukannya tindak lanjut dari penelitian tersebut, hingga bertolak kepada perlunya pendampingan kompetensi Legal Drafting di Desa. Adapun pemilihan sasaran program adalah di Kabupaten Banyumas.

Kabupaten ⁸ Banyumas merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri yang tinggi, yakni menduduki peringkat keenam di Jawa Tengah. Hal tersebut berimplikasi pada timbulnya banyak kasus buruh migran, dan salah satunya perlu penanganan dan penerbitan prosuk hukum dari desa. Dalam penelitian berjudul "Penyusunan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Mewujudkan Desa Sebagai Basis Migrasi Aman Di Kabupaten Banyumas", memperlihatkan salah satu urgensi perlunya kompetensi Legal Drafting bagi komponen pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas. (Kadar Pamuji, dkk: 2018)

Kabupaten Banyumas berbatasan dengan ³ Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemasang, disebelah utara. Kabupaten Cilacap, disebelah selatan, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Brebes, kemudian disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Kebumen dan Banjarnegara. Luas wilayah 132.759.56 ha, dan dibagi kedalam 27 Kecamatan yang terdiri dari 30 kelurahan dan 301 desa, sehingga jumlah Kelurahan dan desa ada 331. (Rochati: 2018)

Dengan fenomena wilayah seperti itu, Kabupaten Banyumas, mayoritas adalah masyarakat desa. Sebagai mana telah dilakukan analisis dari berbagai penelitian tentang fungsi legislasi desa, ditemukan masih lemahnya kompetensi Legal Drafting aparatur desa di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Daerah sebenarnya memiliki kewenangan dalam menyediakan kebutuhan yang berbentuk peningkatan kapasitas bagi aparatur desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum membuahkan hasil yang optimal.

Di Kabupaten Banyumas, terdapat setidaknya dua perguruan tinggi yang dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kompetensi aparatur desa. Perlu sekiranya memetakan apa yang terjadi, bagaimana peran pemerintah dan keterlibatan institusi pendidikan, dan bagaimana kedudukan organisasi sipil kemasyarakatan dalam peningkatan kompetensi aparatur desa.

Harapannya, dengan problem lemahnya kompetensi legal drafting, yang sebenarnya sangat dibutuhkan terutama dalam posisi Kabupaten Banyumas yang memiliki wilayah desa terbanyak, memiliki kelompok rentan yang membutuhkan produk legal hingga ketersediaan produk legal ditingkat desa, dan kondisi nasional global yang mendorong dan membutuhkan pengelolaan desa yang lebih profesional, dapat segera diatasi diantaranya dengan inisiatif peningkatan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Banyumas, melalui program melakukan pendampingan kompetensi Legal Drafting terhadap Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas.

Selain bermanfaat bagi aktualisasi dan implementasikan keilmuan program studi, juga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa di Kabupaten Banyumas tentang pentingnya kompetensi legal drafting dalam melaksanakan otonomi desa dan kebutuhan pelaksanaan rumah tangga desa, dan memberikan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa di Kabupaten Banyumas tentang kompetensi legal drafting dalam melaksanakan otonomi desa dan kebutuhan pelaksanaan rumah tangga desa.

METODE PELAKSANAAN

Kebutuhan akan kompetensi Legal Drafting pada Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas, dapat dijawab dengan pelaksanaan pendampingan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*). Riset yang digunakan adalah pemetaan masalah terhadap problem yang dihadapi di Desa dari berbagai prespektif lokal. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk memformulasikan cara yang tepat agar pelaksanaan pendampingan lebih efektif.

Kegiatan pemetaan awal ini, berkelanjutan atau termasuk dengan kegiatan koordinasi untuk menumbuhkan kepercayaan, dan komitmen bekerja bersama dengan tujuan dan cita-cita yang selaras, demi kepentingan, kebutuhan dan keuntungan semua pihak (Partisipatif).

Setelah mendapatkan pemetaan, maka disimpulkan pemecahan masalah atau solusi untuk perubahan lebih baik, menyusun strategi gerakan dengan analisis SWOT, dan kemudian melancarkan aksi perubahan. Terakhir dilakukan refleksi, sebagai evaluasi keberhasilan program.

Capacity Building adalah aksi yang akan ditawarkan, dalam memecahkan masalah kebutuhan kompetensi Legal Drafting dalam pengelolaan Desa, yakni untuk Desa menjalankan fungsi legislasinya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian, meliputi pelatihan dan pendampingan kompetensi legal drafting melalui metode partisipatif dan praktik yang dilaksanakan selama 3 kali pertemuan di bulan September-Desember 2022, dengan sasaran aparatur desa di Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas s di Desa Bojongsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas. Pengabdian dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hasil dari pengabdian ini adalah terlaksananya berbagai pendampingan terkait pelatihan dan pendampingan kompetensi legal drafting, mencakup:

- a) Pelaksanaan kegiatan FGD pelatihan legal drafting,
- b) Pelaksanaan pendampingan legal drafting ke Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan ke Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, dan Pendampingan naskah legal drafting dalam kebutuhan desa.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan dalam rangka pendampingan kompetensi Legal Drafting terhadap Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas yakni dilaksanakan kepada aparatur desa di Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas dan Desa Bojongsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas, dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Pelaksanaan kegiatan FGD pelatihan legal drafting

Kebutuhan akan kompetensi Legal Drafting pada Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas, Diawali dengan identifikasi masalah awal melalui metode PAR (*Participatory Action Research*). Pemetaan masalah terhadap problem yang dihadapi di Desa dari berbagai prespektif local diharapkan mampu menguatkan komitmen peserta dalam mengikuti pendampingan, diharapkan juga mampu memberikan gambaran untuk memformulasikan cara yang tepat agar pelaksanaan pendampingan lebih efektif.

Kegiatan pemetaan awal ini, merupakan koordinasi untuk menumbuhkan kepercayaan, dan komitmen bekerja bersama dengan tujuan dan cita-cita yang selaras, demi kepentingan, kebutuhan dan keuntungan semua pihak (Partisipatif). Setelah mendapatkan pemetaan, maka disimpulkan pemecahan masalah atau solusi untuk perubahan lebih baik, menyusun strategi gerakan dengan analisis SWOT, dan kemudian melancarkan aksi perubahan. Terakhir dilakukan refleksi, sebagai evaluasi keberhasilan program.

Capacity Building adalah aksi yang ditawarkan, dalam memecahkan masalah kebutuhan kompetensi Legal Drafting dalam pengelolaan Desa, yakni untuk Desa menjalankan fungsi legislasinya, dan disepakai oleh peserta pendampingan.



Gambar 1: Peserta mengikuti kegiatan FGD Legal Drafting bagi Aparatur Desa di Kab. Banyumas.

Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi untuk pengumpulan data dengan cara meminta tanggapan terhadap permasalahan kompetensi Legal Drafting Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas yang dilanjutkan dengan pendampingan Legal Drafting bagi Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dalam yang berisi pelatihan intensif dengan metode partisipatif dan praktik.

b) Pelaksanaan pendampingan legal drafting ke Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan ke Desa Kedungwrngin Kecamatan Patikraja

Pendampingan penyusunan peraturan Desa (Perdes) sebagai upaya penguatan kapasitas desa dimaksudkan bahwa desa memiliki dasar hukum dalam pengelolaan rumah tangga desa dan pelaksanaan fungsi legislatif desa. Berikut merupakan proses pendampingan:

1. Identifikasi kemampuan awal peserta
2. Penyampaian materi legislative drafting secara teori
3. Latihan Implementasi & pendalaman materi legislative drafting
4. Bedah hasil latihan Implementasi & pendalaman materi legal drafting



Gambar 2: Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Legal Drafting bagi Aparatur Desa di Kab. Banyumas.

dapun tahapan pemberian materi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan produk hukum desa.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan penyusunan produk hukum desa.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang teknis pembuatan hukum desa beserta peraturannya.

1 Legal Drafting/Legislative Drafting ditinjau dari aspek materi, aspek sarana dan prasarana, serta aspek peserta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Materi:

Pemilihan materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan sekaligus dijadikan sebagai media sosialisasi peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa yang terbaru, seperti UU Desa yang baru efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2015.

Penyampaian materi terbagi kedalam tiga sesi, yang diakhiri dengan kuis maupun simulasi kelompok pada setiap sesinya. Agar tidak membosankan dan dapat disajikan lebih menarik, penyampaian materi dilakukan secara dialogis juga dengan menayangkan tayangan yang relevan. Setelah materi pelatihan disampaikan dilakukan simulasi kepada peserta pelatihan dengan mencoba menganalisa sejumlah peraturan desa yang telah berlaku dan ada sebelumnya, terutama dari perspektif hukum serta penulisan dan pemilihan kata menurut Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai tugas terakhir pelatihan, masing-masing kelompok diwajibkan menyusun draft contoh peraturan desa yang kelompok pandang perlu diadakan pengaturannya secara garis besar.

b. Aspek Sarana dan Prasarana:

Sarana dan fasilitas pelatihan cukup menunjang suasana pelatihan sehingga peserta mampu memahami materi yang disampaikan nara sumber dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan setiap pemberian tugas dan pertanyaan dari tim dapat diselesaikan dengan baik oleh peserta pelatihan atau masing-masing kelompok. Antusiasme peserta pelatihan juga sangat nampak pada saat setiap kelompok harus melakukan presentasi tugas akhirnya yang berupa penyampaian gagasan, ide tentang draft peraturan desa.

c) Pendampingan naskah legal drafting dalam kebutuhan desa.

Tim pengabdian dari prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri purwokerto, berusaha mengkonfirmasi riwayat produk hukum dalam kebutuhan desa, bagaimana implementasinya serta melakukan dampingan dengan memberikan pengetahuan mengenai penyusunan produk hukum desa yang baik.

Menurut hasil pengumpulan data, diketahui bahwa Desa Bojongsari begitu pula Desa Kedungwringin belum mendapatkan pelatihan legal drafting, sehingga ketika Menyusun peraturan desa mencontoh dari peraturan desa dengan format yang telah ada, ada beberapa kendala, yakni dalam penyusunan peraturan desa atau produk hukum desa yang spesifik agak sulit seperti perjanjian sewa-menyewa, karena kekurangan kompetensi aparatur desa.



Gambar 3: Kegiatan konfirmasi riwayat produk hukum dalam kebutuhan desa.

Pelatihan yang sudah didapatkan sebelumnya oleh aparatur desa adalah pelatihan administratif umum, adapun peraturan desa yang biasa di dapatkan di dua desa rata-rata sama sekitar 40 produk hukum desa per-tahun, dengan produk yang umum, yakni pengaturan keuangan, ketertiban, kesehatan, dsb. Aparatur desa selanjutnya mengharapkan dilaksanakannya kembali pelatihan dan pendampingan legal drafting yang lebih intens.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tim lakukan dalam bentuk pelatihan penyusunan draft peraturan desa, maka beberapa hal yang menjadi kesimpulan kami yaitu:

1. Pemahaman peserta pelatihan yang terdiri atas unsur Perangkat Desa (executive) dan BPD (legislative) sebagai pembentuk peraturan desa meningkat.
2. Keterampilan Perangkat Desa (executive) maupun BPD (legislative) dalam menyusun draft peraturan desanya sendiri meningkat.

Kegiatan Pengabdian secara umum sudah terlaksana secara keseluruhan dan menjadi data untuk disusun menjadi laporan akhir. Demikian dalam proses pendampingan juga telah dilaksanakan untuk dijadikan bahan data analisis dalam penerapan dimasing-masing Desa. Semoga kedepannya pelatihan legal drafting dapat bekerja sama dengan PEMDA setempat dalam pelaksanaannya juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pendanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami haturkan kepada LPPM UIN SAIZU Purwokerto yang telah mendanai pengabdian berbasis prodi dan terintegrasi KKN ini, juga kepada segenap pimpinan Fak. Syariah UIN SAIZU Purwokerto, serta desa mitra pengabdian yakni Desa Bojongsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas dan Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas.

PUSTAKA

- Abriani, Nining., dkk. (2018). "Tata Kelola Arsip Kantor Desa Di Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Mewujudkan Tertib Arsip Desa". *Khazanah Jurnal Pengembangan Kearsipan* Vol 11, No 1 (2018). <https://doi.org/10.22146/khazanah.41536>
- Amanda, Ariesta., dkk. (2022). "PKM Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas* Vol. 01 No. 01 Juli 2022. Hal 45-53.
- Amboningtyas, Dheasey. (2019). "Pengembangan Capacity Building Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Tugu Semarang". *Jurnal LEKBIS / Vol . X X / N o . 1*, Edisi Maret 2019. Hal 1181-1193.
- Ardhanariswari, Riris., dkk. (2016). "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan". *Tesis Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* Hal. 1386-1400.
- Badriyah Khaleed, 2014. "Legislatif Drafting, Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan". *Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Cetakan Pertama*.
- Indranika, Devit Bagus., dkk. (2020). "Kompetensi Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas". *Public Policy And Managemen Inquiry Volume 1 Issue 1 Tahun 2020, Page 72-78*.
- Indriati Noer., dkk. (2019). "Sikap Anggota Dprd Kabupaten Banyumas Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Idea Hukum* Vol. 5 No. 1 Maret 2019.
- Kartini, Ika Ariani. (2018). "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) Di Tingkat Desa Sesuai Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 18 No. 1 Januari 2018 ISSN 1411-9781.
- Komala, Ratna. (2017). "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Skripsi Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- Nurmalasari, Penny Pitri. (2017). " Formulasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) (Studi Tentang Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)". *Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman*.
- Nurul, Misbahuddin (2010). "Analisis Yuridis Sosiologis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Kerangka Otonomi Desa(Studi Di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)". *Other thesis, University of Muhammadiyah Malang*.
- Pamuji, Kadar., dkk. (2018). "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 625-643. <https://doi.org/10.20885/iusquai.v24.i4.a6>
- Pamuji, Kadar. (2016). " Penyusunan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Mewujudkan Desa Sebagai Basis Migrasi Aman Di Kabupaten Banyumas". *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper* Vol. I. 24-25.
- Rahmawati, Yuni (2022). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah". *Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bandung*. Hal 1-10.

- Rochati. (2018). "Pera³an Kabupaten Banyumas Yang Berbasis Kearifan Lokal Untuk Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 2, Nomor 2, April 2018*. Doi: 10.24970/Jbhl.V2n2.18.
- Sheli Arsani, Ukik. (2017). "Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Dana Desa (Studi Di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas)". Tesis Program Studi S2 Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta . Diakses 10 Agustus 2022. [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/)
- Sobandi, Khairu Roojiqien., dkk. (2010). "Kompleksitas Budaya Politik Akar Rumput Dan Prospek Demokrasi Lokal Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah)". *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Vol2 No 1 (2010)*.
- Sutrisno, E., dkk. (2020). "Fungsi Hukum Dalam Perumusan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa". *Jurnal Yustitia, Vol. 6 No. (1), Hal 1-22*. <https://doi.org/10.31943/Yustitia.V6i1.96>
- Wijayanti, Sri., dkk. (2018). "Perlindungan Buruh Migran Indonesia Melalui Pelatihan Paralegal Di Banyumas". *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*. ISSN: 2549- 8347 (Online), ISNN: 2579-9126 (Print) Volume 2 No. 1 Maret 2018 145-151.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014.

5eb:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas. Diakses 12 Agustus 2022 Pukul 11.19

Pelatihan legal drafting

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.polban.ac.id Internet Source	8%
2	Submitted to University of Oklahoma Health Science Center Student Paper	2%
3	bhl-jurnal.or.id Internet Source	2%
4	jos.unsoed.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
6	www.neliti.com Internet Source	1%
7	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.lppm.unsoed.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unsoed.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On